



NU

DI TENGAH GLOBALISASI

Kritik, Solusi, dan Aksi

NU DI TENGAH GLOBALISASI

Kritik, Solusi, dan Aksi

© UIN-Maliki Press, 2015

xvi + 308 hlm; 14,5 cm x 21 cm

All rights reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Editor:

Muhammad In'am Esha

Tim Kreatif:

Abdul Halim Fathani

Maftuch Junaidy Mhirda

Nia Rahayu

UMP 15015

ISBN: 978-602-1190-49-4

Cetakan Pertama, 2015

Diterbitkan pertama kali oleh:

UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI),

Jalan Gajayana 50 Malang 65144

Telepon/Faksimile (0341) 573225,

E-mail: uinmalikipress@gmail.com

Website://press.uin-malang.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah swt. berkat Rahmat, taufiq dan hidayah-Nya buku ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. para sahabat, dan para pengikut setia Beliau.

Buku ini diterbitkan sebagai bentuk penghormatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap keberadaan NU yang telah banyak memberikan kontribusi dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak saja dalam konteks ideologi kebangsaan, politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam konteks pendidikan di Indonesia.

Secara historis, kelahiran NU tidak dapat dilepaskan dari konteks perjuangan umat Islam. Kelahiran NU sebagai organisasi kemasyarakatan sarat dengan perjuangan baik dalam skala global maupun nasional. Dalam konteks global, NU lahir tidak lepas dari semangat untuk membendung gerakan purifikasi yang pada titik tertentu oleh para ulama pesantren dianggap membahayakan kehidupan keberagamaan yang mayoritas sunni dan lekat dengan tradisi-tradisi keberagamaan Islam yang membumi di tengah masyarakat Indonesia.

Selain itu, terjadinya perubahan geopolitik dan geostrategi yang terjadi di tengah percaturan global umat Islam menjadi

konteks global yang turut memicu kelahiran NU. Penghapusan kekhalifahan Ustmani oleh Musthafa Kemal Attaturk, tumbuh dan berkembangnya gagasan nasionalisme dan demokratisasi, pergantian kekuasaan dari Syarif Husein ke Ibn Sa'ud di kawasan Arab Saudi merupakan beberapa peristiwa penting yang mengiringi kelahiran NU.

Secara nasional, kelahiran NU di antaranya di dorong semangat untuk memperjuangkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan ajaran aswaja, pengembangan pendidikan baik madrasah maupun pesantren, pemberdayaan sosial, pengembangan perekonomian umat Islam melalui pengembangan pertanian dan perdagangan. Hal yang tidak kalah penting adalah kekokohan para Ulama Pesantren untuk menjaga kearifan lokal yang telah menjadi tradisi Muslim di Indonesia.

Dalam Statuten Perkumpulan Nahdlatul Ulama Pasal 2 disebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikannya NU adalah ‘memegang teguh salah satu dari mazhab imam empat yaitu Imam al-Syafi’i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan bagi agama Islam’. Adapun program kerja yang dilakukan meliputi:

“Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermazhab tersebut dalam pasal 2; memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu kitab-kitabnya *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* atau kitab-kitabnya *ahlu bid’ah*; menyiarakan agama Islam di atas mazhab sebagai tersebut dalam pasal 2 dengan jalan apa saja yang baik; berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang beragama Islam; memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, langgar-langgar, dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang yang faqir miskin; mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian,

perniagaan, dan perusahaan, yang tidak dilarang oleh syara' agama Islam" (Bruinessen, 1994:307).

Relasi NU dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sedemikian nyata adanya. Resolusi Jihad yang digemakan oleh NU pada masa revolusi kemerdekaan adalah bukti nyata kontribusi organisasi. Bahkan, dengan adanya Resolusi Jihad ini pejuang *arek-arek Suroboyo* berhasil menewaskan Jenderal Mallaby, pimpinan tentara Inggris di Jawa Timur, dalam pertempuran di Surabaya tersebut. Sedemikian kuatnya gema pertempuran ini, pada saat ini setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Resolusi Jihad ini lahir sebagai bentuk kontribusi NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi Jihad merupakan hasil rapat oleh PBNU 21-22 Oktober 1945 yang dihadiri oleh Konsul Jawa Madura. Di antara yang hadir: KH. Hasyim Asyari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. M. Dachlan, KH. Thohir Bakri, KH. Saham Manshur, KH. Wahid Hasyim, KH. Abdul Jalil Kudus, KH. Iljas, KH. Sjaifuddin Zuhri, KH. Abdul Halim Shidiq, dan lain-lain (Ridwan, 2010:82).

Adapun isi Resolusi Jihad tersebut adalah: (a) Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan; (b) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah sah wajib dipertahankan; (c) Musuh RI, terutama Belanda yang datang dengan membongkeng sekutu dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia; (d) Umat Islam terutama NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak menjajah Indonesia; dan (e) kewajiban tersebut adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban setiap orang Islam (*fardlu 'ain*) yang berada dalam jarak radaius 94 km. sementara mereka yang berada di luar jarak itu berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 km (Ridwan, 2010:83).

Tidak hanya dalam konteks revolusi kemerdekaan, NU juga berkontribusi dalam upaya-upaya pengembangan pendidikan sebagai sarana strategis pengembangan manusia Indonesia yang mayoritas NU. Model pendidikan NU yang selama ini dominan dalam bentuk pesantren, seiring dengan perkembangan akhirnya digagas pendirian Madrasah. Terlebih, para Ulama NU melihat kondisi umat Islam selama di bawah penjajahan sangat terpuruk, dalam keadaan amat tertinggal dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh Belanda, ataupun yang dikelola oleh organisasi-organisasi lainnya.

Meskipun gagasan pengembangan madrasah sudah digulirkan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah, namun secara organisasi semakin mengkristal dengan berdirinya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif). Pendirian Maarif digagas KH A Wachid Hasyim dengan menyelenggarakan konferensi khusus bidang Pendidikan NU di Singosari, Malang pada 12 Pebruari 1938. Hasil konferensi tersebut kemudian dibawa ke Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten 1938. Pada Muktamar inilah ditetapkan pembentukan Badan Otonom NU Ma'arif NU, sekaligus menugaskan KH. A. Wachid Hasyim sebagai nakhoda pertamanya.

KH. A. Wachid Hasyim merupakan salah satu kader NU yang memiliki perhatian tinggi dalam pengembangan pendidikan Islam. Tidak mengherankan jika dalam usia hidupnya yang tidak panjang, 39 tahun (1914-1953), beliau berhasil menorehkan tinta emas dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan tinggi Islam. Ketika itu, tanggal 26 September 1951 (bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1370 H) merupakan hari yang bersejarah dalam dunia pendidikan Islam. Pada hari itu Kementerian Agama untuk pertama kali mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan diresmikan oleh Menteri Agama saat itu, K.H. A. Wahid Hasyim (Adnan & Adnan, 2000:48). PTAIN inilah

yang menjadi cikal bakal berdirinya PTAIN-PTAIN di Indonesia di masa-masa selanjutnya. Secara umum, lahirnya PTAIN didorong oleh semangat untuk mendirikan lembaga pendidikan yang modern sebagai lembaga yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum dan Islam secara seimbang.

Dalam sambutan saat peresmian PTAIN Beliau menegaskan bahwa keberadaan PTAIN di Indonesia memiliki posisi yang strategis bagi umat Islam. Hal ini tidak lain karena dengan adanya PTAIN diharapkan: (a) akan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa. Terlebih, umat Islam adalah umat dengan jumlah terbesar di Indonesia; (b) di tengah kehidupan yang serba cepat, diharapkan keberadaan PTAIN akan meningkatkan semangat dan jiwa pembangunan; (c) dengan menyempurnakan pendidikan tinggi akan dapat dihindarkan terjadinya perpecahan dan kesenjangan antara golongan *mutihan* dan *abangan* yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara (Sanusi, dkk., 1985:84).

Demikianlah, kalau kita menelisik secara mendalam dalam sejarah perkembangan PTAIN di Indonesia yang saat ini sudah memiliki bentuk kelembagaan UIN, IAIN, dan STAIN, maka tidak bisa tidak akan berkaitan dengan NU baik secara kelembagaan maupun secara personal para tokohnya. Pada titik inilah, tidak salah jika pada perhelatan Muktamar NU ke-33 di Jombang yang berlangsung 1-5 Agustus 2015, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ikut *mangayubaya* dengan menerbitkan buku ini.

Kita berharap, penerbitan buku ini dapat mengingatkan kembali spirit perjuangan membangun bangsa dan negara dalam berbagai bidang kehidupan seperti yang telah dilakukan para ulama. Terlebih dalam konteks sekarang ini, spirit perjuangan tersebut harus selalu dikobarkan agar bangsa ini dapat memenangkan persaingan di kancan regional dan global. Secara khusus, penerbitan buku ini semoga dapat meningkatkan spirit perjuangan sivitas

akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saat ini sedang melakukan pengembangan institusional dan akademik menjadi Universitas Berkelas Internasional (*World Class University*) sebagai langkah strategis mewujudkan visi besar sebagai *The Center of Excellence and Islamic Civilization*.

Akhirnya, kami mengucapkan selamat bermuktamar NU ke-33. Semoga muktamar ini akan menghasilkan tidak saja pemimpin ke depan yang mampu membawa NU menjadi organisasi kemasyarakatan yang semakin baik, tetapi lebih dari itu mampu menghasilkan program-program aksi yang besar dalam pengembangan umat Islam di Indonesia ke depan yang lebih baik. Semoga.

Malang, 20 Juli 2015
Rektor,

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si.
NIP. 19590101 199003 1 005

PENGANTAR EDITOR

Perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 yang berlangsung di Jombang 1-5 Agustus 2015 menjadi saat-saat penting bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar di Indonesia ini. Kalau kita asumsikan bahwa jumlah penduduk Muslim di Indonesia 200 juta dan 50%nya tergabung dalam NU, berarti jumlah anggota NU di Indonesia tidak kurang dari 100 juta penduduk. Sebuah angka yang cukup fantastis untuk ukuran sebuah organisasi kemasyarakatan. Terlebih, keanggotaan NU tidak bersifat struktural, tetapi lebih bersifat kultural dan “ideologis”. Belum lagi sifat patron-klien atau paternalistik yang dimiliki penduduk pedesaan yang banyak menjadi warga NU.

Mencermati “potensi” yang dimiliki NU, tidak mengherankan jika ormas ini selalu menjadi perhatian banyak kalangan. Setidaknya terdapat beberapa kelompok kepentingan yang sedikit banyak akan “mentelengi” perhelatan Muktamar ke-33 ini mengingat pada perhelatan semacam ini akan dilakukan “pelahiran” nakhoda NU untuk beberapa tahun ke depan. Berbagai kelompok kepentingan tersebut, yaitu:

Pertama, pemerintah. Pemerintah berkepentingan terhadap keberadaan pemimpin NU ke depan. Jangan sampai pemimpin NU ke depan adalah pemimpin yang “kontra” terhadap program-program pemerintah. Masih ingat dalam rekaman nalar sejarah kita bagaimana pemerintah pada masa Orde Baru berusaha

mengkooptasi NU dengan menempatkan calon pemimpin NU yang pro pemerintah. Dalam konteks *governance*, hal semacam ini adalah nalar yang rasional. Karena keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah itu sendiri, tetapi juga ditentukan oleh bisnis dan masyarakat sipil. Tidak heran jika pemimpin NU ke depan adalah pemimpin NU yang diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dan bukan sebaliknya.

Kedua, partai politik. Sebagai organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggota yang massif tentu sangat menggiurkan bagi partai politik untuk mendulang suara terlebih dalam iklim demokrasi langsung seperti sekarang ini. Meskipun, NU secara politik memiliki partai yang diklaim sebagai partai yang dilahirkan secara resmi oleh NU yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), namun pasca khittah NU telah memberikan *blessing in disguise* di mana banyak kader NU yang menyebar menjadi kader di berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Partai-partai politik tentu akan berusaha untuk memasukkan “orang-orang” ke lingkar pengambil keputusan atau setidaknya dekat dengan tokoh-tokoh sentral NU yang nantinya diharapkan bisa dijadikan pendulang suara (*vote-getter*) dalam pemilu.

Ketiga, kelompok radikal Islam. Sebagai organisasi kemasyarakatan dengan jargon perjuangan untuk menyebarkan Islam moderat, Islam *rahmatan lil'alamin*, pembela NKRI sebagai bentuk negara yang sudah final. Tentu kelompok di luar itu akan mencermati Muktamar NU ini dengan seksama. Bisa jadi mereka berharap akan terjadi perpecahan krusial di tubuh NU sehingga soliditas NU menjadi berkurang. Hal semacam inilah yang harus diwaspadai. Berbagai kelompok dengan kepentingan yang beragam bisa bermain dalam kontestasi di *event* Muktamar ini. Terlebih, pada saat ini “perseteruan” dengan kelompok radikal Islam sedemikian kentara dan terbuka seperti ancaman-ancaman yang ditujukan kepada tokoh-tokoh NU yang muncul di media sosial.

Keempat, kelompok bisnis. Siapa yang tidak tertarik dengan potensi bisnis di tengah kalangan warga NU yang berjumlah 100 juta jiwa. Ini adalah pasar (*market*) yang sangat menggiurkan. Kalangan bisnis baik itu yang berasal dari NU maupun non-NU tentu juga tertarik. Tidak hanya itu, bagaimana profil dan program-program besar NU dalam bidang ekonomi tentu menjadi hal yang sangat penting dicermati. Terlebih, pada saat ini gerakan ekonomi dan kewirausahaan di kalangan NU semakin tumbuh dengan baik dan menjadi program penting. Tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, para pebisnis juga sangat *care* dengan isu stabilitas. Dan, itu salah satunya bisa dilihat dari kontruksi perilaku politik warga NU sebagai ormas terbesar di Indonesia.

Kelima, kelompok *international interest*. Kelompok *internasional interes* juga akan mencermati dengan seksama perhelatan Muktamar NU. Mereka berkepentingan untuk tetap bisa mengamankan “kepentingan-kepentingannya” di bumi Indonesia. Oleh karena itu, kelompok-kelompok semacam ini dapat dipastikan akan memantau dengan seksama jalannya perhelatan terbesar bagi warga NU ini. Hal ini juga terkait dengan persoalan geopolitik dan geostrategik internasional di Indonesia. Jangan sampai perhelatan Muktamar NU ini akan membawa dampak negatif yang kompleks di masa yang akan datang. Terlebih, membahayakan stabilitas dalam konteks global.

Demikianlah, perhelatan Muktamar NU pada hakikatnya merupakan arena perjuangan dan kontestasi berbagai kepentingan. Terlebih, pada tahun-tahun mendatang kita memasuki sebuah era komunitas ASEAN (*ASEAN-Community*). Di samping juga secara makro, kita saat ini hidup di era globalisasi. Masyarakat saat ini telah menjadi satu komunitas yang semakin terintegrasi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, apa yang terjadi di belahan dunia yang lain akan berpengaruh baik langsung maupun

tidak langsung terhadap kondisi kita di Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita menempatkan Muktamar NU dalam kerangka makro semacam ini tidak mengherankan jika banyak pihak ikut “mencermati” apa yang terjadi dalam perhelatan ini.

Tentu kita berharap, Muktamar NU ke-33 di Jombang yang bersejarah ini, karena dihelat di tempat kelahiran para tokoh sentral NU seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah, akan melahirkan tokoh yang akan mampu menjadi penggerak NU pasca Gus Dur, Sang Guru Bangsa. Kita juga berharap dalam muktamar ini akan dihasilkan keputusan-keputusan strategis bagi kemaslahatan umat Islam sejalan dengan visi dan misi pendirian NU. Semoga. []

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pengantar Editor	ix
Daftar Isi	xiii

PENDAHULUAN

Tantangan NU ke Depan: Perlu Pemimpin Berwawasan Global <i>M. Zainuddin</i>	3
---	---

Bagian Pertama
**NU, KEPEMIMPINAN,
DAN TANTANGAN MODERNITAS**

Merindukan Pemimpin NU Berjiwa Pejuang <i>Imam Suprayogo</i>	15
Nahdlatul Ulama' (NU) di Tengah Gelombang Perang Ideologis dan Tantangan Modernitas <i>Agus Maimun</i>	21

Peran Strategis Nahdlatul Ulama di Era Kenusantaraan-Global <i>Muhammad In'am Esha</i>	37
 <i>Great Leader dalam Pusaran NU</i> <i>Syaiful Mustofa</i>	55
 Peran Kepemimpinan dalam Membentuk Perilaku Islami (Catatan Model Kepemimpinan untuk Warga <i>Nahdliyin</i>) <i>Ilfi Nur Diana</i>	65
 <i>Bagian Kedua</i>	
NU, ASWAJA, DAN PESANTREN	
DI TENGAH PERUBAHAN	
 Menyibak Munculnya Khittah dan Implikasi Politisnya (Studi Ulama NU dalam Peta Politik antara Tahun 1980-1999) <i>Akhmad Muzakki</i>	77
 <i>Ahlussunnah Wal Jama'ah Sejarah Perkembangan</i> Pemikiran pada Era Awal, Pertengahan, dan Sekarang <i>Mohammad Asrori Alfa</i>	95
 Reformulasi Pemikiran <i>Aswaja</i> : Upaya Memperkecil Sikap Eksklusivitas Ideologi Keagamaan Muslim <i>Nahdliyin</i> <i>Roibin</i>	115
 Mengembalikan Pesantren NU sebagai <i>Agent of Change</i> <i>A. Khudori Soleh</i>	125

Bagian Ketiga

NU, PENDIDIKAN, DAN KHAZANAH KEILMUAN

Penguatan Madrasah Maarif NU (Harus) Lahir Batin <i>Abdul Malik Karim Amrullah</i>	139
Pengembangan Madrasah Ma'arif Monyongsong Masyarakat Ekonomi Berbasis ISO 9001:2008 <i>Alfin Mustikawan</i>	151
NU dan Pendidikan Islam Ramah <i>Mohammad Mahpur</i>	175
Al-Qur'an, Sastra, dan Pesantren <i>M. Faisol</i>	187

Bagian Keempat

NU DAN GERAKAN SOSIAL-EKONOMI UMMAT

<i>Ummati... Ummati...</i> (Sebuah Kisah Pemberdayaan Umat) <i>M. Fauzan Zenrif</i>	211
Membangkitkan NU dan Ekonomi Pesantren <i>Muh. Yunus</i>	227
Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU): Tantangan Kelembagaan dan Pendayagunaan ke Depan <i>M. Abdul Hamid</i>	243

Urgensi Berwirausaha bagi Generasi <i>Nahdliyyin</i> dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi <i>Nur Asnawi</i>	261
---	-----

PENUTUP

Agenda NU Pasca Muktamar ke-33 <i>M. Mujab Mashudi</i>	279
---	-----

PERAN STRATEGIS NAHDLATUL ULAMA DI ERA KENUSANTARAAN-GLOBAL

Muhammad In'am Esha*

Pendahuluan

Perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2015 seolah menjadi momentum penting bagi organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia ini untuk semakin mengokohkan peran dan fungsi strategisnya di tengah dinamika masyarakat baik pada skala nasional maupun global. Mengapa demikian? Setidaknya terdapat beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, mengacu pada *blue-print ASEAN Community* dapat diketahui bahwa saat ini merupakan tahun dimana masyarakat ASEAN akan segera memasuki tatanan baru dalam hubungan antar-negara. Masyarakat ASEAN telah menjadi satu komunitas yang semakin terintegrasi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fenomena inilah yang saya sebut sebagai “Era Kenusantaraan Kembali (*Re-Nusantara Era*)” bagi Masyarakat ASEAN. Disebut demikian karena pada abad ke-13 sesungguhnya nenek moyang kita telah mengalami hal yang sedemikian. Masyarakat ASEAN berada dalam satu persekutuan di bawah kekuasaan Mojopahit.

* Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Pengembangan Bisnis. Menulis beberapa buku antara lain *Menuju Pemikiran Filosafat, Teologi Islam, dan Percikan Filosafat, Sejarah, dan Peradaban Islam*.

Kedua, dalam konteks geopolitik internasional tahun 2015 terjadi momentum penting yang menurut para analis menyebutnya sebagai lahirnya babakan baru berakhirnya era unipolar menuju bipolar. Hal ini ditandai dengan bangkitnya kekuatan dari “Timur” yaitu China dan Rusia sebagai kekuatan penyeimbang yang selama ini didominasi Amerika Serikat dan Sekutunya. Pada saat peringatan kekalahan Nazi pada perang dunia kedua yang dipusatkan di Rusia, China dan beberapa negara memperingati dengan parade militer dan pasukan China pun terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal yang belum pernah terjadi pasca runtuhnya Uni Soviet. Situasi geopolitik yang lain adalah terjadinya konflik bersenjata di Yaman yang melibatkan Saudi Arabia dan Iran. Dua negara yang senantiasa berebut pengaruh di Timur Tengah. Perseteruan ini juga membawa implikasi pada munculnya konflik laten antara sunni dan syi'i di dalam dunia Islam.

Dalam situasi semacam ini, sebagai organisasi massa yang terbesar di Indonesia, NU dituntut memberikan peran strategis. Hal ini tidak lain karena pikiran-pikiran warga nahdliyin dapat dipastikan akan sangat menentukan kearah mana pendulum sejarah Muslim di Indonesia utamanya akan bergerak. Tulisan ini secara sistematis akan membahas tentang peran strategis Nahdlatul Ulama di Era Kenusantaraan-Global saat ini. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran seiring dengan keberadaan NU di masa-masa yang akan datang. Secara berturut-turut akan dibahas hal-hal yang berkenaan dengan ruang publik sebagai ranah perjuangan, sejarah kelahiran NU, NU dalam kontestasi kenusantaraan-global. Tulisan ini akan diakhiri dengan penutup.

Ruang Publik sebagai Ranah Perjuangan

Ada dua kata kunci dalam konteks ini yang perlu mendapat perhatian, yaitu: ruang publik (*public sphere; Inggris*) dan ranah perjuangan (*champ; Perancis*). Istilah ruang publik menjadi peristilahan yang ramai diperbincangkan. Dalam catatan Hardiman,¹ meskipun secara historis peristilahan ini sudah dikenali sejak lama, tetapi istilah ruang publik menjadi wacana yang menarik di dalam ilmu sosial-politik pasca runtuhan komunisme Uni Soviet dan semakin menguatnya pengaruh demokratisasi dan globalisasi.

Kalau pada masa era perang dingin, konsepsi ideologi dan revolusi menjadi penentu dalam konteks pembentukan asosiasi-asosiasi di masyarakat dan pertarungan dalam konteks sosial politik, pada saat ini kedua istilah itu tergeser dengan konsep-konsep demokratisasi, liberalisasi, globalisasi, dan termasuk ruang publik. Kalau pada zaman dahulu pendorong perubahan sosial lewat piranti ideologi yang ditetapkan oleh elit, maka pada saat ini dengan konsep ruang publik ini seluruh warga negara didorong untuk berpartisipasi dalam menentukan arah perubahan sosial politik secara komunikatif. Masih hangat dalam ingatan kita apa yang terjadi beberapa tahun lalu di kawasan Timur Tengah (*Middle East*) yang telah terjadi perubahan sosial politik melalui gerakan masyarakat yang dimulai dari partisipasi publik melalui media sosial.

Kata “publik” (*public*) dan “kepublikan” (*publicity*) seperti halnya kata demokrasi, republik, partai, globalisasi. Kata-kata tersebut merupakan kata serapan. Bukan *genuine* dari bahasa Indonesia. Kata publik dari kata *publicus* (Latin). Ia mewakili sebuah pemahaman konseptual tentang ‘keumuman’, ‘kewargaan’, ‘kemasyarakatan’, ‘kenegaraan’, sebagai kebalikan dari konsep privat. Pengertian publik yang paling kuno seringkali dipahami

¹ F. Budi Hardiman. *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius. 2010. 1.

sebagai hal-hal yang mengacu pada ‘umum’, ‘terbuka’, ‘diumumkan’, dan sejenisnya.²

Menilik pada sejarah kehidupan masyarakat Yunani, munculnya *polis* menjadi titik awal bagi analisis tentang kepublikan dan keprivatan. Ada perbedaan dalam masyarakat Yunani berkenaan dengan ‘organisasi politik’ yang dikontraskan dengan ‘organisasi alamiah keluarga’. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat Yunani, manusia memiliki dua eksistensi yaitu apa yang dimilikinya secara pribadi dan apa yang menjadi milik bersama. Yang pertama inilah yang bersifat privat diistilahkan dengan *idios* dan yang kedua bersifat milik umum, milik negara yang diistilahkan dengan *demosios*. Dalam konteks ini pula akhirnya kita mengenal dua macam istilah yaitu *idion* diartikan “individual” dikontraskan dengan *koinon* diartikan “milik kolektif/bersama”.³

Pada abad ke-21 ini, istilah ruang publik menjadi semakin menarik menjadi diskusi dalam ilmu sosial seiring dengan semakin populernya pikiran-pikiran filsuf Jurgen Habermas yang diantaranya menulis buku berjudul *the Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (1989).⁴ Dalam buku ini dibahas tentang asal-usul lahirnya ruang publik borjuis, struktur sosial ruang publik, fungsi politik ruang publik, perubahan sosial dan struktur ruang publik, perubahan fungsi politik ruang publik, dan perihal konsep opini publik.⁵

Ruang publik dalam konteks ini dipahami sebagai jembatan yang memungkinkan terjadinya relasi-relasi antara kepentingan pribadi dari individu-individu dalam kehidupan keluarga dengan

2 F. Budi Hardiman, *Ibid.* 5.

3 A. Setyo Wibowo. “Kepublikan dan Keprivatan di Dalam Polis Yunani Kuno” dalam F. Budi Hardiman. *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius. 2010. 24.

4 Buku ini telah diterjemahkan oleh Yudi Santosa dan diterbitkan oleh Kreasi Wacana Yogyakarta dengan judul *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis* tahun 2007.

5 Jurgen Habermas. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Terj. oleh Yudi Santosa. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2007.

kepentingan kehidupan sosial yang muncul dalam kekuasaan negara⁶. Ruang publik, dengan demikian, merupakan hal yang menjembatani pertemuan antara kepentingan rakyat dan negara.

Ruang publik adalah ruang diskursif bagi semua individu menyalurkan dan memperjuangkan aspirasinya dihadapan negara. Demikian sebaliknya, melalui ruang publik juga didialogkan, dikomunikasikan, dan didiskusikan kepentingan negara kepada publik. Ruang publik adalah ruang partisipasi diskusif masyarakat.⁷ Berdasarkan uraian singkat ini setidaknya dapat dipahami bahwa ruang publik merupakan medan diskursif partisipatif masyarakat dan negara untuk memperjuangkan kepentingan dan kehidupan sosial.

Istilah kedua yang perlu dibahas dalam konteks ini terkait dengan istilah ranah perjuangan atau *champ*. Realitas kehidupan manusia dipahami tidak monolitik. Tetapi, realitas ini terdiri dari berbagai ranah, medan, atau arena. Kita mengenal ada ranah sosial, ranah politik, ranah pendidikan, ranah ekonomi, dan seterusnya. Masing-masing ranah ini memiliki aturan main sendiri-sendiri yang khas. Meskipun, dalam beberapa hal terjadi tumpang tindih. Di dalam masing-masing ranah inilah bisa kita saksikan terjadinya kontestasi antara berbagai kepentingan untuk memperebutkan dominasi, kepentingan, dan kekuasaan. Tidak heran jika ranah tidak lain menjadi medan atau arena pertarungan dan perjuangan.

Menurut perspektif teori Bourdieu, arena didefinisikan sebagai ruang yang terstruktur dengan kaidah-kaidah keberfungsiannya sendiri, dengan relasi-relasi kekuasaannya sendiri. Arena merupakan konsep dinamis yang ditentukan oleh perubahan posisi struktur modal yang dimiliki oleh para aktor.⁸ Konsep ranah perjuangan

6 B. Hari Juliawan. "Ruang Publik Hubermas: Solidaritas Tanpa Intimitas" dalam *BASIS*. Nomor 11-12 Tahun Ke-53, Nov-Des. 2004. 32.

7 A. Setyo Wibowo. *Op.Cit.* 26.

8 Randal Johnson. "Pengantar Pierre Bourdieu tentang Seni, Sastra, dan Budaya" dalam

berangkat dari pengandaian dasar bahwa dalam setiap arena selalu diwarnai realitas perjuangan. Hal ini tidak lain karena dalam semua masyarakat selalu ada pertarungan antara yang menguasai dan yang dikuasai. Ranah perjuangan pada hakikatnya merupakan ranah perjuangan untuk memperebutkan dominasi. Dalam perspektif Bourdieu, proses pertarungan memperebutkan dominasi tersebut sangat ditentukan oleh struktur modal yang dimiliki oleh para aktor atau agen yang terlibat, selain tentunya aspek situasi, sumberdaya, dan strategi.⁹ Lebih lanjut, Johnson dalam tulisan pengantarnya untuk buku Bourdieu yang berjudul *The Field of Cultural Production* (1993) menulis sebagai berikut:

Di dalam arena apapun, agen-agen yang menempati berbagai macam posisi yang tersedia (atau yang menciptakan posisi-posisi baru) terlibat di dalam kompetisi memperebutkan kontrol kepentingan atau sumberdaya yang khas dalam arena bersangkutan. Di arena ekonomi misalnya, agen-agen saling bersaing demi modal ekonomi melalui berbagai strategi investasi dengan menggunakan akumulasi modal ekonomi.¹⁰

Penjelasan di atas menegaskan bahwa realitas kehidupan manusia sarat dengan perjuangan memperebutkan kontrol kepentingan, kekuasaan, dominasi, dan sejenisnya. Dalam sebuah arena, para aktor terlibat dalam perjuangan. Dalam proses perjuangan semacam itu keberhasilan memenangkan kontestasi di antaranya akan sangat ditentukan oleh pemanfaatan struktur modal yang dimiliki. Dalam arena pendidikan misalnya, kita mengenal ada perankingan apakah itu dalam konteks akreditasi, webometriks, ataupun seperti perangkingan *ala Times Higher Education-World Ranking (THE-World Ranking)*. Model perankingan

Pierre Bourdieu. *Arena Produksi Kultural sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Terj. oleh Yudi Santosa. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2010. vii.

9 Haryatmoko. "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa" dalam *BASIS*. Nomor 11-12 Tahun Ke-52, Nov-Des. 2003. 11.

10 Randal Johnson. *Op.Cit.* vii.

semacam inilah sesungguhnya potret dari arena perjuangan dalam konteks pendidikan. Setiap perguruang tinggi berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Mereka saling memperebutkan posisi menjadi yang terbaik. Perjuangan untuk memperebutkan sebagai perguruan tinggi terbaik akan sangat ditentukan bagaimana lembaga tersebut mampu mendayagunakan struktur modal yang dimilikinya.

Menilik dari dua konsep utama di atas yaitu konsep tentang ruang publik dan ranah perjuangan, maka setidaknya dapatlah dipahami bahwa dalam ruang publik kita tidak sepi dari berbagai macam bentuk perjuangan. Ruang publik bukanlah ruang hampa yang tanpa makna dan statis. Ruang publik adalah ruang dimana di situ diperjuangkan berbagai kepentingan publik. Upaya untuk memperjuangkan kepentingan publik ini merupakan sebuah upaya strategis yang harus dilakukan dalam rangka memenangkan pertarungan kepentingan dan kekuasaan. Ruang publik pada hakikatnya adalah ruang kontestasi kepentingan publik.

Sekilas Kelahiran NU

Kehadiran sebuah lembaga tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya. Mendasarkan pada pemikiran Bourdieu bahwa kehadiran institusi sosial tidak dapat dilepaskan dari ranah perjuangan. Kelahiran organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang berdiri tanggal 31 Januari 1926 pun demikian. Keberadaan NU pada saat itu tidak dapat dilepaskan dari konteks yang mendorong kemunculannya sebagai bagian dari keniscayaan historis umat Islam Indonesia. Kehadiran NU pada saat itu tidak dapat dilepaskan dan menjadi bagian penting dari arena perjuangan publik.

Setidaknya terdapat beberapa konteks historis yang menjadi kekuatan pendorong hadirnya organisasi kemasyarakatan NU dengan pengikut terbesar di dunia saat ini, yaitu:

Pertama, geliat kesadaran kebangsaan dan keagamaan di Indonesia. Munculnya organisasi sosial kebangsaan maupun sosial keagamaan seperti Budi Utomo, Syarikat Islam (SI), dan Muhammadiyah telah menjadi poin masuk (*entry-point*) munculnya gerakan-gerakan sejenis dalam ikut berkontribusi mengembangkan semangat memajukan umat Islam di Indonesia. Adalah KH Wahab Hasbullah yang saat itu baru pulang dari Makkah mengadakan gerakan *tashwirul afkar* bagi kader muda Islam dalam bentuk pertukaran gagasan dan untuk mendorong kebangkitan umat Islam. Pada fase selanjutnya, berdirilah *Nahdlatul Wathon* (NW) yang artinya kebangkitan tanah air. Organisasi ini diakui pemerintah Belanda pada tahun 1916. Kalau *tashwirul afkar* mengadakan kursus-kursus dan perdebatan-perdebatan bagi para kader muda Islam dalam membangun dan mengembangkan wawasan kebangunan umat, maka NW ini merupakan pelembagaannya dalam mewujudkan gagasan-gagasan besar pengembangan umat Islam saat itu. Tujuannya NW tidak lain untuk memperluas dan memperdalam kualitas mutu pendidikan yang diselenggarakan di madrasah.¹¹

Kedua, semangat membangkitkan perekonomian umat. Kondisi terpuruknya masyarakat Islam saat ini menimbulkan keprihatinan di kalangan kyai. Terutama akibat dominasi perekonomian oleh masyarakat Cina dan penjajahan Belanda. Adalah KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Khasbullah memelopori pendirian *Nahdlatut Tujjar* (NT). Alasan mendasar pendirian NT selain karena kondisi objektif perekonomian masyarakat di desa, juga didorong pemikiran perlunya melakukan gerakan kebangkitan ekonomi mandiri di kalangan masyarakat bumiputra.¹² Keprihatinan para ulama terhadap kondisi ekonomi umat Islam sehingga mendorong mereka untuk melakukan upaya-upaya strategis pengembangan

11 Nur Khalik Ridwan. *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Arruz Media. 2010. 33.

12 Jarkom Fatwa. *Sekilas Nahdlatut Tujjar*. Yogyakarta: LKiS. 2004.

ekonomi umat menjadi daya dorong yang kuat bagi pendirian organisasi ini. Tidak heran, jika gagasan-gagasan pengembangan ekonomi umat ini di kemudian hari menjadi bagian penting dalam upaya-upaya NU secara organisasi.

Ketiga, tren purifikasi. Dalam konstalasi sosial keagamaan pada saat itu dunia Islam sedang didominasi munculnya gerakan purifikasi yang dimotori oleh pemikiran-pemikiran yang bercorak Wahabi. Semangat dari gerakan purifikasi adalah upaya untuk mengembalikan ajaran Islam yang murni terhadap ajaran-ajaran Islam yang dipandang sudah tidak asli dan bercampur dengan tradisi lokal.¹³ Gerakan purifikasi ini pada titik tertentu telah menimbulkan kegelisahan-kegelisahan di kalangan ulama Pesantren yang selama ini mewarisi tradisi wali songo dalam penyebaran dan pengembangan umat Islam. Wali Songo menjadikan tradisi lokal sebagai wahana atau medium dakwah Islam. Tranformasi sosial dengan menjadikan tradisi sebagai medium dakwah telah terbukti berhasil menjadikan bumi nusantara menjadi bumi Islam yang damai. Islam menyebar dengan damai dan tanpa perang. Model dakwah Islam yang menjadikan kearifan lokal sebagai basis dakwah inilah yang tidak jarang dijadikan “titik persoalan” bagi kaum puritan. Kehadiran NU, secara esensial, memperjuangkan kemaslahatan umat Islam di tengah-tengah upaya-upaya gerakan puritanisme yang pada titik tertentu justru menjadi titik balik dalam pengembangan dakwah Islam.

Keempat, runtuhnya khilafah Islam dan penguasaan kota Mekkah oleh Raja Ibn Saud yang Wahabi. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal Attaturk menghapus sistem kekhilifahan. Penghapusan sistem kekhilifahan ini akhirnya memunculkan respon di dunia Islam. Dimotori oleh Syaikh al-Azhar dan Syarif Husein dari Arab Saudi direncanakan akan dilangsungkan pertemuan politik membahas

13 Rumadi. *Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*. Jakarta: Depag. Dirjen. Pendidikan Islam. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 2007. 31.

tentang kekhalifahan. Namun, karena Syarif Husein kalah dalam peperangan melawan Raja Saud akhirnya pertemuan internasional itu difasilitasi oleh Raja Saud di Hijaz. Merespons rencana pertemuan internasional tersebut, para tokoh Islam di Indonesia melangsungkan beberapa kali kongres dan penyiapan utusan untuk kegiatan tersebut. Dalam kongres, KH Wahab Chasbullah yang mencemaskan pengaruh kuat wahabi mengusulkan agar pelestarian tradisi ahlusunnah wal jamaah, perbaikan tatalaksana haji, tradisi tarekat sufi dan wirid, pembacaan shalawat nabi, pengajaran kitab-kitab mazhab menjadi agenda yang dibawa dalam pertemuan Hijaz tersebut. Namun, gagasan tersebut tidak mendapat respon dari kalangan non-pesantren. Menghadapi hal demikian, akhirnya ulama kalangan pesantren sepakat mengirimkan utusan sendiri yang disebut Komite Hijaz. Komite inilah dalam rapat di Surabaya diberi nama dengan Nahdlatul Ulama. Dalam pertemuan itu tanggal 31 Januari 1926 itu juga disepakati untuk mengirimkan delegasi ke Mekkah menemui Raja Saud untuk menyampaikan aspirasi ulama pesantren tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian singkat diatas dapat dipahami bahwa kelahiran NU merupakan organisasi kemasyarakatan Umat Islam yang sarat dengan perjuangan baik dalam skala global maupun nasional. Dalam Statuten Perkumpulan Nahdlatul Ulama Pasal 2 disebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikannya NU adalah ‘memegang teguh salah satu dari mazhab imam empat yaitu Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah Annu’man, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan bagi agama Islam’.¹⁵

14 Rumadi. Ibid. hlm. 36. Martin van Bruinessen. *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS. 1994. Hlm. 26. M. Ali Haidar. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1998. 55.

15 Martin Van Bruinessen. *Op. Cit.* 307.

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan NU berdasarkan Statuten Pasal 3 adalah sebagai berikut:

“Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermazhab tersebut dalam fasal 2; memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu kitab-kitabnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah atau kitab-kitabnya ahlu bid’ah; menyiarkan agama Islam di atas mazhab tersebut dalam fasal 2 dengan jalan apa saja yang baik; berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang beragama Islam; memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, langgar-langgar, dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang yang faqir miskin; mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan perusahaan, yang tidak dilarang oleh syara’ agama Islam”.¹⁶

Berdasarkan paparan di atas dapat kita pahami bahwa kehadiran NU secara sosio-historis memang tidak sepi dari arena perjuangan publik umat Islam terutama di kalangan pesantren dalam rangka mengembangkan kesadaran kebangsaan, membangun kemandirian bangsa, mengembangkan Islam yang berbasis pada al-Qur'an dan Sunnah dengan tetap menjaga dan menjadikan kearifan lokal sebagai bagian penting dalam berdakwah, mengembangkan pendidikan, dan juga mengembangkan perekonomian umat Islam di pedesaan melalui usaha-usaha pertanian dan perdagangan.

NU dalam Kontestasi di Era Kenusantaraan-Global

James K. Galbraith¹⁷ dalam bukunya yang berjudul *The End of Normal* menuliskan bahwa terjadinya gonjang-ganjing dan krisis ekonomi seperti yang tengah melanda di beberapa belahan dunia saat ini sampai pada pernyataan ‘*the problem lies with the economic principles or the way they have been understood*’. Pernyataan

16 Martin Van Bruinessen. *Ibid.* 307.

17 James K. Galbraith. *The End of Normal*. New York: Simon & Schuster. 2014.

ini menegaskan bahwa peranan para aktor menjadi hal yang sangat mendasar. Kualitas manusia, dengan demikian, menjadi kata kunci (*key-term*).

Demikian juga dengan NU, jika ingin memenangkan perjuangan maka kata kuncinya adalah manusianya. Terlebih pada saat ini umat Islam tengah hidup di era globalisasi dan informasi. Apa yang terjadi di era globalisasi seperti sekarang ini? Mansilla and Jackson¹⁸ mencatat bahwa setidaknya terdapat tiga kekuatan besar yang membentuk kehidupan kita pada saat ini yaitu:

Pertama, globalisasi telah menjadikan dunia menjadi datar (*flat*). Dalam bidang ekonomi jelas sekali bahwa dunia saat ini akan saling terintegrasi dalam tatanan satu dunia. Apa yang terjadi di benua lain akan berpengaruh pada belahan dunia lain. Apa yang terjadi di Yunani saat ini misalnya, maka mempengaruhi ekonomi di belahan dunia yang lain. Demikian juga kelesuan ekonomi yang terjadi di Amerika dan China juga berpengaruh ke negara-negara lain. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial dan politik juga demikian. Globalisasi sangat memungkinkan untuk berkembangkan berbagai macam ideologi trans-nasional baru yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, kewaspadaan dan upaya yang terus-menerus untuk menanamkan nilai-nilai ke-Indonesiaan menjadi tugas besar yang harus dilaksanakan oleh NU sebagai garda depan Islam di Nusantara ini. Dengan demikian, logika yang dikembangkan harus dibalik. Umat Islam Indonesia jangan menjadi pengimport Islam trans-nasional yang sering berbeda dengan “darah” umat Islam Indonesia, tetapi sebaliknya harus mengeksport nilai Islam Nusantara yaitu nilai Islam yang dibawa oleh Rasullullah saw dan nilai kearifan yang telah diajarkan oleh para Wali Songo di Nusantara yang moderat dan *rahmatan lil alamin*.

18 Veronica Boix Mansilla dan Anthony Jackson. *Preparing Our Youth to Engage the World*. New York: Asia Society-CCSSO. 2011.

Kedua, terjadinya migrasi global yang tidak terprediksi dan perubahan sifat kebertetanggaan (*neighborhood*), identitas (*identity*), dan kewarganegaraan (*citizenship*). Kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi telah mendorong terjadinya arus migrasi yang luar biasa antar bangsa dan negara. Dalam konteks semacam ini, menjadikan kehidupan sosial dan politik semakin kompleks. Kebertetanggaan, identitas, dan kewarganegaraan menjadi semakin beragam. Di Indonesia misalnya, saat ini banyak sekali warga negara asing yang tinggal bertetangga dengan kita. Hal semacam ini tentu membawa konsekuensi sosial dan politik yang tidak sederhana. Terlebih, dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah dihadapan mata umat Islam Indonesia, misalnya, maka arus barang, jasa, dan orang menjadi sebuah keniscayaan.

Ketiga, iklim yang tidak stabil dan pertumbuhan kebutuhan global dalam pengurusan kondisi lingkungan yang lebih baik. Pada saat ini dunia diliputi ketidakpastian iklim. Seperti yang terjadi di Indonesia, dulu para petani kita bisa memprediksikan kapan terjadinya musim hujan dan musim kemarau saat ini waktu kedua musim tersebut tidak bisa diperdiksikan (*titi mongsone tan keno dititeni*). Ketidakpastian musim ini tentu akan berpengaruh besar di antaranya pada mekanisme pertanian dan juga pelayaran bagi para pencari ikan. Kondisi cuaca yang tidak stabil menjadi susah bagi pelaut untuk turun ke laut. Hal ini jika tidak diantisipasi tentu akan berpengaruh pada produksi pertanian dan hasil perikanan. Persoalan mendasar semacam ini, jika tidak ditanggulangi akan memunculkan dampak ekonomi dan sosial yang tidak sederhana. Tidak jarang, persoalan-persoalan sosial bukan berasal dari masalah politik dan agama, tetapi berakar pada persoalan perut.

Dalam kondisi semacam ini, NU sebagai organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggota yang terbesar di Indonesia harus dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Terlebih sebagian

besar anggotanya tersebar di pedesaan. Kehadiran NU sebagai organisasi kemasyarakatan harus mampu menjadi kekuatan sipil dalam melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat. NU tidak hanya berperan menjaga kohesi sosial tetapi lebih dari itu harus menjadi kekuatan pemberdayaan bagi masyarakat.

Menilik apa yang telah ditulis oleh Galbraith bahwa kualitas manusia menjadi pilar dalam melakukan perubahan, maka NU sebagai organisasi kemasyarakatan tidak boleh tidak harus terus menerus mengupayakan pengembangan kualitas sumberdaya manusia. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam konteks ini, yaitu: *pertama*, NU sudah saatnya memiliki *roadmap* pengembangan sumberdaya manusia dalam 25-50 tahun ke depan. *Road map* ini penting dalam rangka memberikan arah pengembangan yang dilakukan NU dari waktu ke waktu. *Kedua*, pengembangan kualitas pendidikan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi harus dilakukan secara terus menerus dengan tetap memegang teguh ruh ajaran-ajaran pokok ke-NU-an. Harapannya, di era globalisasi semacam ini warga NU tetap memiliki basis ideologi keaswajaan yang senantiasa terwariskan dari generasi ke generasi. Terlebih, dengan perkembangan media sosial seperti sekarang ini ideologi-ideologi yang bertebaran menjadi semakin kompleks. *Ketiga*, pengembangan ekonomi masyarakat NU yang diasaskan pada potensi lokal. Basis pengikut NU yang sebagian besar berada di pedesaan harus menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi umat. Kebangkitan ekonomi umat harus dimulai dari masyarakat desa yang kaya akan potensi ekonomi. Harapannya, masyarakat NU dari waktu ke waktu akan semakin baik tingkat ekonomi dan diharapkan akan mampu menjadi penggerak ekonomi nasional.

Ranah perjuangan NU mengacu pada Statuten Perkumpulan NU 1926 tidak saja berdimensi pada upaya ranah perjuangan yang bersifat “ideologis” yaitu memperjuangkan aswaja, tetapi

juga memenangkan pertarungan untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih cerdas dan sejahtera. Hal ini tersurat dengan jelas dalam ikhtiar yang diagendakan NU sebagai organisasi untuk senantiasa tidak saja memperjuangkan dan menjaga keaswajaan di kalangan Umat Islam Indonesia, tetapi juga mengembangkan aspek pendidikan dan ekonomi. Terlebih, di tengah era kenusantaraan-global yang sarat dengan pertarungan baik dalam ranah ideologi, ekonomi, sosial, politik, dan juga keagamaan.

Penutup

NU dengan modalitas yang dimilikinya sangat berpotensi untuk menjadi pemenang dalam arena perjuangan di era kenusantaraan-global saat ini. NU yang mengembangkan nilai-nilai moderatisme dan mengusung Islam yang *rahmatan lil' alamin* sebagaimana menjadi esensi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw melalui para Wali Songo ke Nusantara terbukti telah berhasil membawa kemaslahatan umat Islam di dunia Islam umumnya dan umat Islam Indonesia khususnya. Strategi dakwah Wali Songo yang arif-bijaksana terbukti telah memberikan spektrum yang lebih indah dalam penyebaran dan dakwah Islam yang nir-kekerasan.

Di era kenusantaraan-global seperti sekarang ini, NU harus hadir untuk memberikan warna di setiap arena yang melingkupinya. Nilai-nilai sosial-historis positif yang dikristalisasi dari ajaran para ulama pendahulu (Wali Songo) perlu disemaikan di bumi nusantara ini dan secara massif strategis harus ditransformasikan kepada masyarakat dunia. Jika saat ini terjadi bursa gagasan-gagasan Islam transnasional, maka umat Islam Indonesia dengan NU-nya harus mampu menjadi kekuatan untuk menyemaikan model Islam yang moderat dan *rahmatan lil' alamin*.

Dalam konteks semacam ini, tidak ada jalan lain jika NU harus senantiasa mengembangkan sumberdaya manusianya sebagai aktor-

aktor yang akan terlibat langsung dalam arena perjuangan tersebut. Kalau kita mendasarkan pada strategi yang sudah ditetapkan oleh para *founding fathers* NU dalam pengembangan kualitas SDM NU, maka ada tiga pilar yang tidak bisa harus dilakukan oleh NU dari waktu ke waktu: *pertama*, aspek “ideologi” keaswajaan; *kedua*, aspek pendidikan; dan *ketiga*, aspek ekonomi. Jika strategi pengembangan ini dapat dilakukan dengan baik oleh NU, maka insyaallah tujuan NU untuk mengupayakan kemaslahatan bagi umat Islam akan terwujud.

Mengakhiri tulisan ini ada baiknya saya kutipkan tulisan KH. Abdurrahman Wahid saat memberikan Pengantar Umum untuk buku yang menyajikan kumpulan tulisan KH. A. Wahid Hasyim, Sang Ayahanda, yang berjudul *KH. A. Wahid Hasyim: Mengapa Memilih NU?: Konsepsi tentang Agama, Pendidikan, dan Politik* (1985). Judul tulisan Pengantar Umum yang ditulis oleh Gus Dur tersebut adalah “*Kebangkitan Kembali Peradaban Islam: Adakah Ia?*”. Tulisan ini diangkat dari teks ceramah penulis di Kelompok Salman ITB, Bandung. Beliau menulis sebagai berikut:

Kaum muslimin masa kini memang tidak dituntut untuk menyamai penemuan para sarjana masa lampau, dari al-Kindi sampai penemu muslim tak dikenal yang menemukan besi hitam tak berkarat di India dari masa kejayaan dinasti Mughal. Tetapi mereka *dituntut untuk menerapkan dan menafsirkan kembali penemuan-penemuan sesuai dengan kebutuhan hakiki umat manusia, tugas mana jauh lebih berat dari tugas melakukan penemuan itu sendiri*. Kaum muslim masa kini tidak dituntut untuk menghasilkan karya agung sastra dunia seperti Kalilah Wa Dimnah. Tetapi mereka diberi kemampuan untuk memberikan arti baru kepada kehidupan melalui karya itu, yang juga bukan tugas lebih ringan: *meneruskan tradisi secara dinamis jauh lebih berat dan sukar daripada membuat tradisi itu sendiri*. Kaum muslimin masa kini tidak dituntut untuk

mendirikan aliran-aliran Hukum Islam seperti mazhab-mazhab fiqh yang empat, atau aliran Theologia Islam, seperti mashab tauhid al-Asy'ari dan al-Maturudi ataupun al-Ghazali, tetapi mereka diharuskan menerapkan secara kreatif ketentuan-ketentuan yang diletakkan kesemua mazhab itu dalam situasi kehidupan yang baru sama sekali, sebuah proses penafsiran kembali yang jauh lebih sulit dari mendirikan ke semua mazhab itu sendiri.¹⁹ Wallahu'a'lam bishawwab. []

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Fatwa, Jarkom. 2004. *Sekilas Nahdlatut Tujar*. Yogyakarta: LKiS.
- Galbraith, James K. 2014. *The End of Normal*. New York: Simon & Schuster.
- Habermas, Jurgen. 2007. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Terj. oleh Yudi Santosa. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Haidar, M. Ali. 1998. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Hardiman, F. Budi. 2010. *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haryatmoko. 2003. "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa" dalam *BASIS*. Nomor 11-12 Tahun Ke-52, Nov-Des.
- Johnson, Randal. 2010. "Pengantar Pierre Bourdieu tentang Seni, Sastra, dan Budaya" dalam Pierre Bourdieu. *Arena Produksi Kultural sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Terj. oleh Yudi Santosa. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

19 Abdurrahman Wahid. "Kebangkitan Kembali Peradaban Islam: Adakah Ia?" Pengantar Umum dalam Buntaran Sanusi, dkk. (Ed.) KH. A. Wahid Hasyim. *Mengapa Memilih NU: Konsepsi tentang Agama, Pendidikan dan Politik*. Jakarta: Inti Sarana Aksara. 1985. VII.

- Juliawan, B. Hari. 2004. "Ruang Publik Hubermas: Solidaritas Tanpa Intimitas" dalam *BASIS*. Nomor 11-12 Tahun Ke-53, Nov-Des.
- Mansilla, Veronica Boix dan Anthony Jackson. 2011. *Preparing Our Youth to Engage the World*. New York: Asia Society-CCSSO.
- Ridwan, Nur KHalik. 2010. *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Rumadi. 2007. *Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*. Jakarta: Depag. Dirjen. Pendidikan Islam. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
- Wahid, Abdurrahman. 1985. "Kebangkitan Kembali Peradaban Islam: Adakah Ia?" Pengantar Umum dalam Buntaran Sanusi, dkk. (Ed.) KH. A. Wahid Hasyim. *Mengapa Memilih NU: Konsepsi tentang Agama, Pendidikan dan Politik*. Jakarta: Inti Sarana Aksara.
- Wibowo, A. Setyo. 2010. "Kepublikan dan Keprivatan di Dalam Polis Yunani Kuno" dalam F. Budi Hardiman. *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.